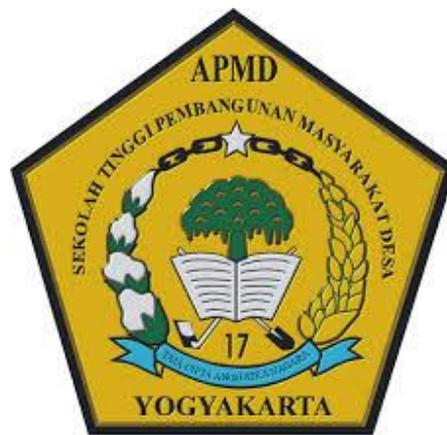


**PEMANFAATAN FASILITAS KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI KALANGAN PENGUSAHA MIKRO
(Sebuah Penelitian Pada Lingkungan Pengusaha Mikro
Di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)**



Disusun Oleh :

AULIA RAHMAN HAKIM

NIM : 12510004

PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI

JENJANG PROGRAM S-1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Team Penguji
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Jumat
Tanggal : 14 Oktober 2016
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD
“APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

| Nama | Tanda tangan |
|--|--------------|
| 1. Ketua Penguji / Pembimbing Ratna Sesotya W., S.Psi., M.Si.Psi. | |
| 2. Penguji Samping 1 Drs. E. Wuryono | |
| 3. Penguji Samping 2 Dra. Hj. Oktarina Albizzia, M.Si. | |

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Sosiatri

(Drs. AY. Oelin Marliyantoro, M.Si)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016

MOTTO

**“Man jadda wajada, man shabara zhaafira,
wa man saara' aladdarbi washala”**

Siapa bersungguh - sungguh pasti berhasil,
siapa yang bersabar pasti beruntung,
dan siapa yang menapaki jalan Allah SWT akan sampai ke tujuan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ibu dan Bapakku tersayang, yang dengan sabar telah mengantarku menuju cita-cita.
- ❖ Kakak dan adikku yang kusayangi, yang membuatku lebih bersemangat dalam belajar.
- ❖ Teman-teman seperjuangan di Program Studi Sosiatri, atas dorongan dan motivasi kalian untuk bisa wisuda bersama-sama.
- ❖ Segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkah dan ridho-Nya maka karya tulis yang berjudul ***“PEMANFAATAN FASILITAS KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KALANGAN PENGUSAHA MIKRO (Sebuah Penelitian Pada Lingkungan Pengusaha Mikro Di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)***, dapat penyusun selesaikan dengan selamat tanpa halangan sesuatu apapun yang berarti.

Sudah barang tentu banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung; baik moril maupun materiil. Untuk itu ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Ibu Ratna Sesotya W., S.Psi., M.Si.Psi., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan perhatian, masukan, dan dorongan moril dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. AY. Oelin Marliyantoro, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosiatri S-1.
3. Bapak Drs. E. Wuryono, selaku Penguji Samping 1.
4. Ibu Dra. Hj. Oktarina Albizzia, M.Si., selaku Penguji Samping 2.
5. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.

6. Bapak & Ibu Dosen selaku Staf Pengajar di Program Studi Ilmu Sosiatri STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan ketrampilan yang sangat berarti.
7. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan Ijin Penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bapak Bupati Kulon Progo, yang telah memberikan Ijin Penelitian di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
9. Para pengusaha mikro di lingkungan Kecamatan Pengasih, yang telah bersedia menjadi responden penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan dan / atau keterlibatan mereka skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Akhir kata, semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2016.

Penyusun,

Aulia Rahman Hakim

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| E.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) | 13 |
| 1.1. Pengertian Kredit | 13 |
| 1.2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) | 15 |
| 1.3. Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) | 21 |
| 1.4. Faktor-faktor yang mendorong pemanfaatan KUR | 22 |
| E.2. Pengusaha Mikro | 27 |
| 2.1. Pengertian Pengusaha | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2. Pengertian Pengusaha Mikro | 29 |
| F. Metode Penelitian | 30 |
| F.1. Jenis Penelitian | 30 |
| F.2. Ruang Lingkup Penelitian | 31 |
| a. Obyek penelitian | 31 |
| b. Definisi konsep | 31 |
| c. Definisi operasional | 33 |
| F.3. Populasi dan sampel | 37 |
| F.4. Sumber data | 37 |
| F.5. Teknik pengumpulan data | 38 |
| F.6. Teknik analisis data | 41 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | 42 |
| 1. Wilayah Administrasi Kecamatan Pengasih | 42 |
| 2. Kondisi Alam Wilayah | 44 |
| 3. Kondisi Kependudukan | 45 |
| 4. Kondisi Sarana Prasarana Perekonomian | 47 |
| BAB III : ANALISIS | 49 |
| A. IDENTITAS RESPONDEN | 49 |
| B. A N A L I S I S | 53 |
| BAB IV : PENUTUP | 70 |
| A. KESIMPULAN | 70 |
| B. SARAN | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|--|------------|
| Tabel I.1. | Data Perkembangan UMKM Tahun 2011- 2012 | Halaman 11 |
| Tabel II.1. | Luas Wilayah Kecamatan Pengasih | Halaman 44 |
| Tabel II.2. | Perkembangan Penduduk Kecamatan Pengasih Tahun 2010 – 2014 | Halaman 45 |
| Tabel II.3. | Jumlah Penduduk Menurut Desa Berdasarkan Hasil SP 2010 dan Estimasi Penduduk 2015 | Halaman 46 |
| Tabel II.4. | Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa Di Kecamatan Pengasih Tahun 2015 | Halaman 46 |
| Tabel II.5. | Jumlah Pasar, Mini market, Toko dan Warung makan di Kecamatan Pengasih | Halaman 47 |
| Tabel III.1. | Karakteristik responden menurut umur | Halaman 50 |
| Tabel III.2. | Karakteristik responden menurut pendidikan | Halaman 50 |
| Tabel III.3. | Karakteristik responden menurut jenis kelamin | Halaman 51 |
| Tabel III.4. | Karakteristik responden menurut agama | Halaman 52 |
| Tabel III.5. | Jenis usaha responden | Halaman 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama setiap kebijakan negara yang sedang membangun termasuk di Indonesia adalah diarahkan untuk menghilangkan masalah-masalah pokok yang kini masih fundamental di negara Indonesia yakni : masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan arus urbanisasi berlebih di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Salah satu upaya yang dapat dijadikan solusi ke arah pengurangan masalah tersebut adalah pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena, banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari

keberadaan UMKM yang tetap eksis dan berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi (tahun 1998 dan 2008). Bahkan menjadi katub penyelamat bagi pemulihan ekonomi Indonesia karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada Product Domestic Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Terlepas dari peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM juga memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan payung hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM (*Muhammad Guntur, 2008*).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Sektor UMKM jumlahnya yang sangat besar sesuai dengan data BPS (2012) terdapat 1.328.147 unit yang tersebar di seluruh pelosok nusantara (*Muhammad Guntur, 2008*). Selain jumlahnya yang sangat besar, namun keberadaannya memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian barang dan jasa ke seluruh Tanah Air. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20/2008, yaitu :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. distribusi pendapatan dan arus urbanisasi berlebih.

Pada 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi 58,1 persen terhadap PDB, 97,2 persen terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor. Ini menjadikan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat struktur ekspor. Beberapa literatur mengungkapkan UMKM juga berperan penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. UMKM menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sekitar 67 persen dari tenaga kerja yang terlibat di UMKM merupakan kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi sumber penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat menengah-bawah, tetapi juga menjadi sumber bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*Meby Damayanti dan Latif Adam, 2015*).

Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Kesulitan modal bagi UMKM sudah menjadi persoalan utama yang selalu dirasakan oleh pelaku UMKM. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan akses langsung terhadap informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal bank maupun non formal, misalnya BUMN dan LSM. Pada umumnya UMKM tidak mampu memanfaatkan kredit dari Bank karena pihak UMKM tidak mampu memenuhi agunan yang dipersyaratkan oleh Bank, di samping rumitnya birokrasi. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar dana modal kerja dan investasi

berasal dari sumber informal, di mana sumber pembiayaan yang digunakan adalah sangat bervariasi, antara lain berasal dari tabungan pribadi, pinjaman dari sahabat atau kenalan, pinjaman dari pemasok bahan baku, pinjaman dari tuan tanah dan pinjaman dari pelepas uang (*Muhammad Guntur, 2008*).

Sejalan dengan peran strategis UMKM maka Pemerintah mulai memperhatikan dan memberikan fasilitas permodalan berupa pinjaman Kredit Usaha Mikro (KUR). Program kredit yang diluncurkan pada tahun 2010 melalui bank BRI ini adalah dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Pada tahun 2015 dalam upaya menggenjot sektor riil pemerintah telah menetapkan dan menyediakan dana melalui program KUR sebesar Rp. 30 triliun. Dana itu akan dibagi pada empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alokasi dana untuk kredit mikro sebesar Rp. 20 triliun, ritel sebesar Rp. 9 triliun, dan tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 1 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa : “KUR selama ini dinilai signifikan untuk mendorong pembiayaan pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR akan menjadi program yang besar dan akan melibatkan koordinasi strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan” (*Darmin Nasution, 2015*).

Dikatakan oleh Suparman Sumahadjaya, direktur Lembaga Bina Wirausaha, bahwa untuk pembangunan suatu Negara pada dasarnya dibutuhkan 2% dari jumlah penduduknya itu adalah para wirausahawan ulung (*entrepreneurs*) (*Suparman Sumahadjaya, 1978 :46*)

Apabila patokan kuantitas yang dikemukakan oleh Suparman Sumahadijaya tersebut kita terapkan pada kondisi di Indonesia, dengan perkiraan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015 sebesar 255,461,686 jiwa, (*Rizali Ritonga*) berarti bahwa Indonesia memerlukan sebanyak kurang lebih 5 juta wirausahawan. Jumlah itu tidaklah sedikit apabila kita sadari kondisi pengusaha-pengusaha kita saat ini. Memang di Indonesia terdapat lebih dari 5 juta orang yang bergerak dalam bidang usaha swasta mulai dari yang kelas teri sampai kelas kakap tetapi pengusaha-pengusaha tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai wirausahawan (*entrepreneur*).

Mengenai pentingnya wirausahawan sebagai penunjang utama terlaksananya pertumbuhan ekonomi secara jelas diungkapkan oleh Jochen Roepke sebagai berikut :

Dalil utama kami sederhanakan saja : suatu bangsa akan berkembang secara ekonomis, apabila bangsa tersebut mempunyai wirausaha-wirausaha yang mempunyai kebebasan dan motif-motif yang mendorongnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat kewirausahaan yang sebetulnya berarti mengadakan inovasi, yaitu mewujudkan gagasan-gagasan baru menjadi praktek (*Jochen Roepke, 1978 : 66-67*).

Jelaslah bahwa yang menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat sekarang ini, bahkan untuk masa-masa yang akan datang adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berjiwa wirausaha. Tetapi menciptakan manusia wirausaha, dalam pengertian entrepreneur, tidaklah semudah membalik tangan.

Mengkaji masalah manusia wirausaha pada hakekatnya adalah mengkaji pula kualitas manusia. Artinya, kita harus memperhatikan sejumlah variabel

kompleks yang membentuk perilaku manusia. Variabel-variabel ini meliputi unsur-unsur yang bersifat intern seperti : pendidikan, mentalitas, motivasi, etos, watak dan sebagainya. Disamping itu juga unsur-unsur yang bersifat ekstern seperti : lingkungan fisik, sosial, politik dan ekonomi. Bahkan sebagian dari unsur-unsur tersebut harus dicari jauh dalam sejarah budaya bangsa yang bersangkutan.

Masalah kewirausahaan dalam dunia usaha Indonesia tidak hanya dihadapi oleh pengusaha mikro, masalah ini juga dihadapi oleh pengusaha-pengusaha swasta nasional yang sudah tergolong kelas menengah dan kuat. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang bukan karena pemiliknya telah mempraktekan perilaku kewirausahaan, tetapi adalah karena mereka memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah yang berbau proteksi. Fakta ini diungkapkan oleh Ismid Hadad dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan sebagai berikut :

Memang sektor swasta nasional yang mandiri belum pernah mampu menumbuhkan akarnya yang kukuh di negeri ini. Kalaupun ada yang sempat menjadi besar dan kuat pastilah ia punya kaitan yang erat dengan modal atau kekuatan lain di luar usahanya sendiri. Inilah kenyataan pokok yang dihadapi dunia bisnis dalam perekonomian Indonesia dari dulu hingga kini (*Ismid Hadad, 1979 : 2*).

Apabila kita telusuri kembali sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kita akan menemukan fakta-fakta yang dapat menjelaskan lemah atau kurangnya perilaku kewirausahaan di kalangan pengusaha pribumi. Dari sana akan terlihat dengan jelas benih kewirausahaan itu tertanam.

Suparman Sumahadijaya, menyebutkan masa itu sebagai masa perbudakan yang telah melahirkan sikap mental RM JIPUN (Rendah diri, Malas, Jiwa Punakawan) dan RM JIBUDAL (Rendah diri, Malas dan Jiwa Budak yang bebal) yang kemudian berjangkit dan berkembang sampai kini, serta menghambat tampilnya para wirausahawan di kalangan pengusaha swasta nasional Indonesia (*Suparman Sumahadijaya, 1978 : 112*).

Dengan sistem sosial, politik dan ekonomi yang berlangsung pada masa itu jelas bahwa kesempatan untuk tumbuh dan berkembang benih kewirausahaan di Indonesia sangatlah kecil atau sempit. Akibatnya, setelah masa kemerdekaan pengusaha pribumi belum siap untuk menjadi wirausahawan.

Tidaklah mengherankan apabila pada saat Pelita 1 di mulai, pengusaha-pengusaha yang dapat dikatakan siap untuk berpartisipasi secara penuh adalah golongan non-pribumi, karena adanya pengalaman, hubungan-hubungan dagang dan modal yang telah mereka kuasai jauh sebelumnya. Golongan pribumi pada umumnya belum siap untuk berpartisipasi secara penuh (*Ariono Abdulkadir, 1983*).

Telah dikatakan di muka bahwa kewirausahaan erat hubungannya dengan faktor mentalitas dan sistem nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Secara lebih luas, Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, menjelaskan bahwa ada dua penyebab timbulnya sifat kelemahan mentalitas bangsa Indonesia. Beliau dalam hal ini membedakannya ke dalam dua hal, yakni :

- 1) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita, karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu
- 2) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai budaya kita.
(Koentjaraningrat, 1984 : 32-42)

Kelemahan mentalitas yang bersumber dari sistem nilai budaya kita, tercermin dalam sikap yang tidak berorientasi terhadap hasil karya manusia (tidak achievement oriented), menguntungkan diri pada nasib dan sifat konformisme yang berlebihan sehingga menghambat timbulnya motivasi berprestasi (*need for achievement*) (Koentjaraningrat, 1984 : 32-42)

Kelemahan mentalitas yang timbul pada masa post-revolusi tercermin dalam sifat-sifat berikut ini :

- 1) sifat mentalis yang meremehkan mutu;
- 2) sifat mentalitas yang suka menerabas;
- 3) sifat tak percaya kepada diri sendiri;
- 4) sifat tak berdisiplin murni dan;
- 5) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

(Koentjaraningrat, 1984 : 32-42)

Dalam rangka usaha pengembangan dunia usaha nasional khususnya dalam usaha menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pengusaha pribumi, maka apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat tersebut, yakni hambatan-hambatan mental sedikit demi harus dihilangkan. Harus digantikan dengan mentalitas yang berorientasi pada prestasi (*achievement*).

Salah satu tema pokok yang dijumpai di dalam banyak kebijakan ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaaan, adalah keinginan untuk mendorong pengusaha pribumi maupun pengusaha ekonomi lemah. Para pengusaha golongan ini sering menyatakan bahwa mereka menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan “orang asing”, mencakup para investor asing dan paru pengusaha nasional keturunan Cina.

Sebelum kemerdekaan, hampir seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor non tradisional ada di tangan pengusaha-pengusaha Belanda dan pengusaha-pengusaha non pribumi (*Peter McCawley, 1982 : 121*). Sesudah kemerdekaan, pengaruh dan peranan pengusaha-pengusaha non-pribumi keturunan Cina tetap besar. Adanya ketidakseimbangan antara pengusaha pribumi dan non-pribumi telah membuat Pemerintah memberikan kebijaksanaan yang berbau proteksi untuk mendorong pengusaha-pengusaha pribumi. Manifestasi dari kebijaksanaan semacam itu antara lain berupa pemberian bimbingan, penyuluhan, dan bantuan permodalan lewat program kredit untuk UMKM. Program kredit yang dimaksud adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2010 untuk kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah tidak lagi menggunakan dichotomi antara pribumi dan non pribumi, tetapi lebih ditekankan pada skala dan kemampuan usahanya..

KUR merupakan kredit yang bersyarat ringan dengan prosedur yang sederhana. Dalam pelaksanaannya, persyaratan ringan dan prosedur sederhana tersebut terlihat pada persyaratan Bank Indonesia dan penilaian bank pelaksana.

Berbeda dengan pemberian kredit lainnya, KUR tidak berorientasi pada tersedianya barang jaminan, tetapi ditekankan pada kelayakan usaha/proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut. Sebagai jaminan pokok dalam KUR adalah usaha atau proyek yang dibiayai dengan kredit ini.

Disamping hal tersebut di atas, persyaratan ringan dan prosedur yang sederhana tercermin pula dalam hal tata cara pengajuan permohonan pinjaman. Berbeda dengan permohonan kredit yang lainnya, permohonan KUR tidak diwajibkan untuk membuat studi kelayakan (feasibility study) yang biasanya penyusunannya cukup rumit.

Campur tangan pemerintah dalam bentuk pembinaan wirausahawan nasional, sebagai manifestasi proses modernisasi yang sedang diusahakan akselereasinya, disamping untuk mengatasi masalah eksternal pengusaha juga masalah internal yang berada dalam batas kemampuan pengusaha untuk mengatasinya. Terlepas dari efektif tidaknya upaya tersebut, pada hematnya akan menarik untuk mengetahui sejauh mana perubahan-perubahan itu, baik yang bersumber dari upaya yang diintroduksir lewat jalur pembangunan maupun yang terjadi sebagai perubahan sosial.

Perilaku Kewirausahaan berkaitan dengan pemupukan modal dan pengambilan resiko. yang merupakan unsur-unsur kewirausahaan. M. Amin Azis mengemukakan adanya lima unsur kewirausahaan, yakni dengan melihatnya dari perilaku kewirausahaan sebagai berikut :

- a. Innovational
- b. Capital accumulation
- c. Leader behavior

- d. Risk taking behavior
- e. Managerial behavior (*M. Amin Azis, 1978 : 41*).

Secara lebih khusus penelitian akan dilakukan pada kalangan usaha mikro, khususnya usaha mikro di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Perkembangan usaha mikro dalam wilayah ini menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal itu dapat diketahui dari perkembangan jumlah unit usahanya, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
Data Perkembangan UMKM
Tahun 2011- 2012

| No | Sektor Ekonomi | 2011 | | 2012 | |
|----|---|----------|----------------|----------|----------------|
| | | Kelompok | Per orangan | Kelompok | Per orangan |
| A | PERTANIAN | | | | |
| 1 | Pertanian, Peternakan | | | | |
| | Kehutanan dan Perikanan | | 70.095 | 1.525 | 72.401 |
| B | NON PERTANIAN | | | | |
| 1 | Pertambangan dan Penggalian | | 142 | 37 | |
| 2 | Industri Pengolahan | | 20.018 | | 20.325 |
| 3 | Listrik, Gas dan Air Bersih | | | | |
| 4 | Bangunan | | 148 | 211 | |
| 5 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | | | | |
| | a. Hotel dan Restoran | | 1.113 | | 131 |
| | b. Pedagang Pasar | | 8.261 | | 2.540 |
| | c. Pedagang di luar pasar | | 3.385 | | 9.336 |
| | d. Pedaki | | 113 | | 113 |
| 6 | Pengangkutan dan Komunikasi | 8 | 946 | | 390 |
| 7 | - Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan | 215 | | | 891 |
| | - Koperasi | 336 | | | |
| 8 | Jasa-jasa | | 1.111 | | |
| | Jumlah | 2.008 | 105.332 | 2.070 | 106.127 |

DAFTAR PUSTAKA

1. Ariono Abdulkadir, *Pengembangan Usaha dalam Ekonomi Pancasila*, dalam : Abdul Masjid dan Sri-Edi Swasono (Ed.) *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983.
2. Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983.
3. BPS Kulon Progo, *Kulon Progo Dalam Angka Tahun 2014*.
4. BPS Kulon Progo, *Statistik Daerah – Kecamatan Pengasih 2016*.
5. Darmin Nasution, dalam wawancara dengan Septian Deny : Liputan6.com, Jakarta, 7 September 2015.
6. David C. McClelland, Prof. Dr., *Memacu Masyarakat Berprestasi*, judul asli : *The Achieving Society*, CV Intermedia, Jakarta, 1987.
7. Departemen Sosial R.I., *Metode Penelitian Sosial Dalam Praktek*, Balai Penelitian dan Peninjauan Sosial, Jakarta, 1970.
8. Fred W.Riggs, *Administrasi Negara-negara Berkembang Teori Masyarakat Prismatis*, Terjemahan oleh : Tim Penerjemah Yasogama, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1985.
9. <http://bisnis.liputan6.com/read/2301709/4-bank-bumn-dapat-tugas-salurkan-dana-kur-rp-30-triliun>
10. <http://ekbis.sindonews.com/read/1041708/34/pemerintah-jadikan-kur-hadapi-ekonomi-global-1441623634>
11. Indriyo Gitosudarmo, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, BPFE, Yogyakarta, 1985.
12. Ismid Hadad, *Akar swasta di mana?*, Topik kita, dalam : Prisma No. 7 Tahun 1979..
13. Jochen Roepke, *Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Prisma No.9, Oktober 1978, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1978.
14. Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, p. 193.

15. Josef Winardi, *Peranan Usahawan Dalam Pembangunan Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1977.
16. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1984.
17. Krishan Lal Sharma dalam : *Entrepreneurial Performance ini Role Perspective*, Abhinav Publications, New Dehli, 1975.
18. M. Amin Azis, *Tingkah Laku Kewirausahaan di Kalangan Petani Aceh*, majalah PRISMA No.9 Tahun 1978, LP3ES, Jakarta.
19. M.Amin Azis, *Tingkah laku Kewirausahaan di Kalangan Petani Aceh*, Prisma No. 9 Tahun 1978, LP3ES, Jakarta, 1978.
20. Mar'at, Prof. Dr., *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
21. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.
22. Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1995
23. Meby Damayanti dan Latif Adam, *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia*, Naskah Kerja TNP2K 27 – 2015 April 2015
24. Muchdarsyah Sinungan, *Kredit, Seluk Beluk, Dan Teknik Pengelolaan*, Penerbit Yagrat, Jakarta, 1980.
25. Muhammad Guntur, *Analisis Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Analisis Mengenai Penumbuhan Iklim Usaha)*, Jurnal Birokrat Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Desember Thn. 2013.
26. Peter Kilby, *Hunting The Heffalump*, dalam : Sri Edi Swasono (ed.), *Entrepreneurship Indonesia*, LPFE UI, Jakarta, 1976.
27. Peter McCawley, *Pertumbuhan Sektor Industri*, dalam Anne Booth dan Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru (Ed)*, LP3ES Jakarta, 1982..
28. Razali Ritonga, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Pusat Statistik.

29. Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial, Penerbit Andi Offset*, Yogyakarta, 1990.
30. Suparman Sumahadijaya, Dr., *Membina Sikap Mental Wirausaha dalam Pembangunan Masyarakat Pancasila*, Penerbit Gunung Jati, Jakarta, 1979..
31. Suparman Sumahadijaya, Dr. , *Belum Ada Wiraswasta di Indonesia*, (dialog) dalam : prisma No. 9 Tahun 1978.
32. Sutrisno Hadi, Prof. Drs. M.A., *Metodologi Research. Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.
33. Tjiptoadinugroho, R., *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
34. Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, 1970.

Peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang **Pokok-pokok Perbankan**.
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**.